

5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH(1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Permintaan keterangan

Yth. (5)

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara nomor(6)
tanggal(7) hal Pengajuan Keberatan atas(8), nomor
.....(9) tanggal(10) Masa/Tahun Pajak(11) NOP
.....(12), dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan
keterangan sehubungan dengan koreksi yang diajukan keberatan yang meliputi:

No	Pos Koreksi	Jenis Keterangan
1	 (13)	 (14)
...		
...		

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

nama :
jabatan :
tempat : (15)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, surat keberatan Saudara akan diproses berdasarkan
data yang ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala kantor.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan, atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan masa/tahun pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak dalam hal pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan dan biaya pemasaran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, jabatan tim peneliti, serta tempat akan disampaikan keterangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.